

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir, Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Asyhadie, Zaeni, 2007, *Hukum Kerja: hukum ketenagakerjaan bidang hubungan kerja*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Budisusila, A, 2021, *Transformasi Ekonomi Indonesia Pasca Pandemi Covid 19*. Sanata Dharma University Press.
- Christiawan, Rio, 2021, *Omnibus Law Teori Dan Penerapannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Djumialdji, FX, 2005, *Perjanjian Kerja*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Djoko Triyanto, 2014, *Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa*, Cetakan Pertama, Mandar Maju, Bandung.
- Hardiansyah, 2022, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Omnibus Law Cipta Kerja (Dalam Teori dan Praktik)*, Deeppublish, Yogyakarta.
- Herdiansyah, Haris, 2019, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial: Perspektif Konvensional dan Kontemporer edisi 2*, Salemba Humanika, Jakarta.
- Hernawan, Ari, 2019, *Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial*, UII Press, Yogyakarta.
- Ismaya, Samun, 2018, *Hukum Ketenagakerjaan*, Suluh Media, Yogyakarta.
- Khakim, Abdul, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno, 2008, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy, 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Subekti, 2014, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti (Cetakan IX), Bandung

Sumardjono, Maria SW, 2021, *Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856)

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6647).

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

## **C. Jurnal**

Amalia, A., *et al*, "Analisis Yuridis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan dan Hukum Perjanjian," *USU Law Journal*, Volume 5, Nomor 1, Januari 2017, hlm. 164.

Adityaningrum, N., *et al*, "Transparansi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang Berkeadilan di Lingkungan Perusahaan Sektor Tekstil, Sandang dan Kulit (Sektor TSK) Kabupaten Tangerang," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Volume 6, Nomor 2, Agustus 2022, hlm. 12961-12971.

- Aprianti, D., “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT),” *Jurnal Hukum Saraswati*, Volume 3, Nomor 1, Maret 2021, hlm. 46-48.
- Budijanto, O. W., “Upah layak bagi pekerja/buruh dalam perspektif Hukum dan HAM,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 17, Nomor 3, April 2017, hlm. 395-412.
- Effendy, M. A., *et al*, “Implementasi dan Permasalahan Mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Pasca Berlakunya Undang-Undang Ciptakerja,” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Volume 11, Nomor 1, Maret 2023, hlm. 135-148.
- Harefa, B. D. S., & Tuhana T., “Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/Pdt. g/2015/Pn. Yyk),” *Privat Law*, Volume 4, Nomor 2, November 2016, hlm. 113-118.
- Ismaya, Samun, “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penetapan Upah Bagi Pekerja Selama Masa Covid 19,” *Wijaya Putra Law Review*, Volume 3, Nomor 1, April 2024, hlm. 39-71.
- Kennedy, Alexander, “Perlindungan Hak Upah Bagi Pekerja Dalam Lingkup Usaha Mikro Kecil Menengah,” *Jurnal Interpretasi Hukum*, Volume 5, Nomor 2, Oktober 2024, hlm. 1108-1119.
- Lazuardi, L., *et al*, “Tinjauan Literatur Kepemimpinan Transformasional Pada Usaha Kecil Menengah (UKM),” *Organum: Jurnal Saintifik Manajemen dan Akuntansi*, Volume 1, Nomor 2, Desember 2018, hlm. 88.
- Miarsa, F. R. D., *et al*, “Analisis Hukum Pemberian Upah Di Bawah Umr Bagi Pekerja Pkwt: Perlindungan Hak dan Konsekuensi Hukum Bagi Pengusaha. *Anayasa*,” *Journal of Legal Studies*, Volume 1, Nomor 1, Juni 2023, hlm. 57-76.
- Shalihah, F., “Implementasi perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dalam hubungan kerja di Indonesia,” *Jurnal Selat*, Volume 4, No. 1, Oktober 2016, hlm. 70-100.
- Rifdah, F., *et al*, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dengan Status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Pada PT. Angkasa Pura Support,” *Journal of Lex Theory (JLT)*, Volume 5, Nomor 1, Maret 2024, hlm. 241-252.

Suliaswati, Rini, “Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat Provinsi di Indonesia,” *Jurnal EKSOS*, Volume 8, Nomor 3, Oktober 2015, hlm. 7.

Wongkaren, Turro S., “Analisa Implementasi UU Cipta Kerja Kluster Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Alih Daya,” *Jurnal Ketenagakerjaan*, Volume 17, Nomor 3, Desember 2022, hlm. 212.

Tampubolon, W. S., “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Volume 4, Nomor 1, Maret 2016, hlm. 53-61.

#### **D. Tugas Akhir**

Dewa Gede Giri Sentosa, 2021, “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pasca Undang-Undang Cipta Kerja: Implementasi dan Permasalahannya,” *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Lampung.

Febrianto, F., 2023, “Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Tenaga Kerja Kontrak Waktu Tertentu Berbasis Keadilan,” *Doctoral dissertation*, Universitas Islam Sultan Agung.

Ferdy, T., 2023, “Implementasi Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Pemberian Izin Usaha Mikro Kecil Menengah (Ukm) Perspektif Fiqh Siyash (Studi Kelurahan Sumur Batu Kota Bandar Lampung),” *Doctoral dissertation*, UIN Raden Intan Lampung.

Saputri, Azzahrani Giri, 2016, “Analisis Kontribusi Usaha Kecil Menengah Di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2000-2014),” *Skripsi*, Program Studi Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Wibawa, N. S., 2024, “Pengawasan dan Perlindungan Pengupahan Terhadap Pekerja Pada Usaha Mikro dan Kecil di Daerah Istimewa Yogyakarta Pasca Undang-Undang Cipta Kerja,” *Tesis*, Universitas Islam Indonesia.

Vania, Alodia Grace, 2018, “Tinjauan Yuridis Terhadap Peralihan Status Pekerja Dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu di P.T. ‘P’,” *Tesis*, Program Magister (S-2) Hukum Bisnis dan Kenegaraan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

## **E. Internet**

Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/246523/uu-no-6tahun-2023>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2024.

Ebta Setiawan, <https://kbbi.web.id/tenaga%20kerja>, diakses pada tanggal 1 oktober 2024.

Erizka Permatasari,  
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturanperpanjangan-dan-pembaruan-pkwt-pasca-uu-cipta-kerjalt57d76d588b24f/>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2024.

Humas MKRI,  
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816&menu=2>, diakses pada tanggal 2 oktober 2024.

Nakita, <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/10/06/ketok-palu-ruucipta-kerja-disahkan-7-poin-ini-jadi-alasan-buruh-tolak-keras-omnibuslaw>, diakses pada tanggal 5 oktober 2023.

Rizal Dwi Novianto dan Frans Simangunsong, “Pengubahan Jangka Waktu PKWT Dalam Hak Tenaga Kerja Untuk Mendapat Jaminan Pekerjaan Tetap”, <http://repository.untag-sby.ac.id/13957/7/JURNAL.pdf>, diakses pada tanggal 18 September 2024.

Saputri, Azzahrani Giri. 2016. Analisis Kontribusi Usaha Kecil Menengah Di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Dan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2000-2014), *Skripsi*, Program Studi Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm. 12-14. <https://repository.umy.ac.id/handle/123456789/5503> diakses pada tanggal 03 Oktober 2024.